



**POTRET PARADIGMA DEVELOPMENTALISME BARU JOKOWI
DALAM FILM DOKUMENTER "WADAS WARAS" (2021):
KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH**

Kirana Mahdiah Sulaeman¹, Mustabsyrotul Ummah Mustofa²

¹ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
kirana19005@mail.unpad.ac.id

² Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
mustabsyrotul.ummah@unpad.ac.id

Received: 2 Maret 2022; Revised: 10 Maret 2022; Accepted: 13 April 2022; Published: 31 April 2022; Available online: 31 April 2022.

ABSTRAK

The documentary film "Wadas Wadas (2021)" by Watchdoc Media Mandiri raises the issue of mining in Wadas Village, Bener District, Central Java. This mining project is part of President Jokowi's ambitious program, namely the National Strategic Project (PSN) which was massively rejected by local residents due to the threat of environmental damage. This study aims to explore how the text producer, namely Watchdoc, constructs discourse and forms social identity in the film, as well as seeks to contextualize this work with a broader socio-political system. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, this study finds that (1) Watchdoc portrays three identities with unequal power relations, namely victims (local residents), perpetrators (government), and observers (legal and environmental experts), (2) text producers sided with local residents based on the spirit of spreading marginalized narratives that were rarely represented in mainstream media, and (3) text producers constructed Jokowi's new anti-developmentalism discourse that relies on static-nationalist ideology by utilizing the Omnibus Law deregulation package.

Keywords: *documentaries; discourse analysis; environment; new developmentalism*

ABSTRAK

Film dokumenter "Wadas Wadas (2021)" karya Watchdoc Media Mandiri mengangkat isu pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Jawa Tengah. Proyek pertambangan ini merupakan bagian dari program ambisius Presiden Jokowi yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditolak secara masif oleh warga lokal karena ancaman kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana produsen teks, yaitu Watchdoc, mengonstruksi wacana dan membentuk identitas sosial di dalam film tersebut, serta mencari kontekstualisasi karya ini dengan sistem sosial-politik lebih luas. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis

Norman Fairclough, penelitian ini menemukan bahwa (1) Watchdoc memotret tiga identitas dengan relasi kuasa yang tidak setara, yaitu korban (warga lokal), pelaku (pemerintah), dan pengamat (pakar hukum dan lingkungan), (2) produsen teks berpihak pada warga lokal atas dasar semangat menyebarkan narasi kaum marjinal yang jarang direpresentasikan di media arus utama, dan (3) produsen teks mengkonstruksi wacana anti-developmentalisme baru Jokowi yang bersandar pada ideologi statis-nasionalis dengan memanfaatkan paket deregulasi Omnibus Law.

Kata kunci: film dokumenter; analisis diskursus; lingkungan; developmentalisme baru

PENDAHULUAN

Gerakan jurnalisme baru di Indonesia mempengaruhi kebangkitan sejumlah film dokumenter yang mewarnai media alternatif non-tradisional di mana para wartawan melawan kaidah peliputan peristiwa dengan cara lebih menyeluruh dan mendalam (Umama, 2021). Dalam salah satu bentuk jurnalisme baru, yaitu jurnalisme advokasi, produser film bahkan menyuntikkan opininya ke dalam berita dan menjadi aktor yang berperan besar dalam pemberitaan yang menyuarakan kepentingan kelompok marjinal dan mempengaruhi kebijakan tertentu (Yusningtyas, et al. 2020). Film-film advokasi seperti ini banyak diproduksi oleh Watchdoc Media Mandiri atau Watchdoc, sebuah rumah produksi independen yang giat menelurkan film dokumenter yang berupaya mengadvokasi komunitas-komunitas yang suaranya seringkali dilupakan

dalam media arus utama (Tantuco, 2021). Beberapa karya yang pernah diproduksi oleh Watchdoc adalah "Samin vs Semen (2015)" yang menceritakan perjuangan petani di Kendeng melawan pabrik semen yang memicu kerusakan lingkungan; "The Endgame (2021)" tentang pelemahan KPK, serta "Wadas Waras (2021)" tentang perlawanan warga Wadas terhadap pertambangan batu oleh pemerintah.

Film "Wadas Waras" merupakan salah satu film Watchdoc yang menarik perhatian publik karena sensitivitas dan popularitas isu yang diangkat. Karya ini adalah bagian dari serial film dokumenter untuk mengungkap bahaya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja bagi masyarakat (WatchdoC Documentary, 2021). UU Cipta Kerja sendiri sempat menjadi rancangan regulasi yang kontroversial pada tahun 2020 karena tudingan proses perancangan yang cacat formil, tidak transparan, inkonstitusional,

dan banyaknya pasal bermasalah yang berdampak pada kerusakan lingkungan (Tempo, 2020). Film ini secara spesifik mengangkat salah satu eksekusi UU Cipta Kerja, yaitu proyek pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang memicu berbagai destruksi ekologis dan mengusik kehidupan warga lokal. Dengan diterapkannya UU Cipta Kerja, terjadi perubahan politik hukum fundamental yang condong mengarah pada eksploitasi lingkungan dan melawan keadilan ekologi akibat simplifikasi perizinan serta limitasi hak atas lingkungan (Pambudhi & Ramadayanti, 2021). Isu ini pun diangkat oleh Watchdoc lewat rangkaian adegan, potongan peristiwa, dan wawancara dengan narasumber.

Dalam penelitian terdahulu, beberapa peneliti telah menggali film-film Watchdoc dengan pendekatan berbeda. Suryani et al. (2021) meneliti konstruksi strategi eksklusif dalam film The Mahuze dengan Analisis Wacana Kritis Van Leeuwen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai produsen teks, Watchdoc memakai strategi pasivasi dan nominalisasi

untuk menyembunyikan aktor sosial dalam narasi film dalam rangka mengkritik pemerintah dan sektor industri di Papua, serta membuat penonton berpikir kritis tentang pelaku yang merugikan warga lokal Papua. Fadli (2017) meneliti alur cerita dan sifat-sifat berlawanan (oposisi biner) yang terdapat dalam film dokumenter Watchdoc berjudul "Rayuan Pulau Palsu" dengan metodologi analisis naratif Tzvetan Todorov dan Claude Levi Strauss. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut berisi prolog pengenalan tokoh utama, lalu perlawanan masyarakat nelayan terhadap reklamasi, dan terakhir adegan klarifikasi dan kemenangan nelayan dalam sidang PTUN. Selain itu penelitian menemukan oposisi biner secara sintagmatik dan paradigmatis. Utari (2020) dalam Analisis Wacana Kritis terhadap Film Dokumenter The Mahuzes pada Kanal Youtube Watchdoc Image menggali film "The Mahuzes" dengan Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan kata oleh produsen teks mempengaruhi wacana yang

dikonstruksi tentang pembangunan di Papua, dan bahwa informan yang sebelumnya menganggap Papua sebagai wilayah terbelakang merasa takjub dengan realitas yang diungkap oleh film bahwa warga Papua memiliki pengetahuan maju terkait pengolahan alam dan sudah sejahtera dengan hasil alam mereka.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggali secara mendalam film "Wadas Waras" untuk mengetahui bagaimana produsen teks, yaitu Watchdoc, mengonstruksi wacana (diskursus) di dalam film tersebut, bagaimana wacana tersebut membentuk identitas-identitas sosial tertentu, dan bagaimana kontekstualisasi karya ini dengan sistem sosial-politik lebih luas. Karena itu, penulis menggunakan kerangka teori diskursus yang dikembangkan oleh peneliti sosial sebagai dampak dari "*linguistic turn*" dan *critical theory* (Howarth, 1998).

TINJAUAN PUSTAKA

Diskursus, dalam kacamata Marxis, merupakan sistem makna ideologis yang menormalisasi distribusi kekuasaan yang tidak seimbang (Howarth, 1998). Sementara dari pandangan post-structuralist seperti Michael

Foucault, diskursus adalah sistem simbolis dan tatanan sosial. Pemikiran Michel Foucault berupaya menggali bagaimana area pengetahuan dan praktik sosial dikonstruksi. Menurutnya, diskursus dapat dipahami dari bagaimana ilmu medis saat ini menjadi praktik kesehatan yang dominan dan menutupi diskursus kesehatan alternatif lainnya seperti homeopathy dan akupunktur. Diskursus termanifestasi ke dalam penggunaan bahasa dan simbol-simbol lainnya seperti gambar, musik, atau percakapan. Tak terbatas pada refleksi kondisi sosial, diskursus juga mengonstruksi realita. Contohnya bagaimana diskursus tertentu memberikan makna atau posisi bagi entitas tertentu (Fairclough, 1992).

Pandangan-pandangan tersebut berpengaruh ada kerangka teori diskursus Norman Fairclough, yang melihat diskursus sebagai praksis sosial berbentuk interaksi simbolis yang dapat digali dari teks (isi percakapan, tulisan, film, musik, hingga gambar). Asumsi dasarnya adalah bahasa bisa menjadi alat untuk berbagai fungsi, mulai dari praktik memerintah, memanipulasi, memengaruhi, membujuk, dan menggerakkan manusia

(Haryatmoko, 2016). Fairclough merujuk pada teori masyarakat Giddens bahwa makna dan pemahaman manusia adalah sentral dalam menjelaskan dunia sosial. Ia menekankan pada tindakan-tindakan agen dalam membentuk relasi sosial (Howarth, 1998).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Untuk menggali bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan sosial, Fairclough dan akademisi sosial lain membangun enam prinsip penting, yaitu: Pertama, pentingnya pemahaman teks yang dianalisis seperti adanya sekaligus pemahaman atas konteks (situasi sosio-budaya di luar teks). Kedua, keberurutan dan intertekstualitas. Kita harus memahami bahwa pelaksanaan wacana itu linear, mengikuti tatanan berurutan, dan berhubungan unsur-unsur di luar teks itu sendiri. Karena itu, kita harus memperhitungkan tindakan atau pemikiran terdahulu sebelum munculnya objek diskursus yang diteliti serta memperhitungkan keterkaitan dengan teks lain.

Ketiga, konstruksi dan strategi. Semua wacana merupakan hasil konstruksi untuk membentuk realitas sosial tertentu, dan bahasa digunakan sebagai strategi agar komunikasi wacana efektif dan tujuan sosial tercapai. Keempat, peran kognisi sosial atau proses mental dan representasi dalam produksi dan pemahaman teks. Kelima, penggunaan kategori-kategori. Sebagai peneliti diskursus, kita harus memerhatikan bagaimana manusia menafsirkan dan mengkategorisasi dunia mereka. Keenam, interdiskursivitas, yakni pemahaman bahwa suatu teks tidak selalu mengandung satu jenis diskursus, namun beragam (Haryatmoko, 2016).

Dengan menggunakan metode ini, penulis menggali tiga dimensi dalam suatu objek penelitian, yaitu dimensi analisis teks (mikro), praktik diskursif (meso), dan praksis sosial (makro). Analisis teks adalah analisis pembendaharaan kata, metafora, istilah, tata bahasa, gramatika, struktur, dan kohesi untuk menemukan representasi, identitas dan relasi (Eriyanto, 2001).

Sementara itu, dalam analisis praktik diskursif, peneliti harus menghubungkan bentuk produksi dan konsumsi teks, bagaimana produsen teks mengkonstruksi diskursus, dan memerhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan. Terakhir, dalam dimensi praksis sosial, analisis dapat ditarik ke konteks sosial lebih luas (Haryatmoko, 2016). Penulis menggunakan dua jenis data; data primer yaitu teks film "Wadas Waras" dan data sekunder yaitu jurnal, media massa, media sosial, dan website resmi lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis teks

1. *Representasi*

Film ini menceritakan proyek pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Warga desa tersebut digambarkan sebagai para petani dan peternak tradisional yang hidup dengan damai dan berkecukupan. Komoditas pertanian desa ini sendiri sangat kaya, mulai dari cengkeh, kapulaga, kemukus, cabe, kelapa, sengon, pisang, aren, petai, vanili, karet jati, keling, akasia, hingga mahoni. Namun, sejak tahun 2016, mulai ada kabar bahwa tanah

mereka akan dijadikan area pertambangan batu. Pada tahun 2018, terjadi pemborosan tanah oleh pemerintah tanpa persetujuan warga. Batu andesit yang ditambang dari Wadas itu akan dijadikan material pembangunan Bendungan Bener, Kecamatan Bener, sejauh 10 km dari Desa Wadas. Bendungan tersebut diproyeksikan dapat menjadi sumber irigasi ke Kebumen, Purworejo, dan Kulom Progo (terutama untuk Yogyakarta International Airport dan aerocity). Namun, Desa Wadas sendiri tidak menikmati air bendungan itu.

Bendungan Bener termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, yaitu program pembangunan yang diciptakan Presiden Jokowi. Dalam salah satu footage pidato pada rapat evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditampilkan dalam film ini, Jokowi menyebut betapa pentingnya bendungan untuk kesejahteraan masyarakat karena dengan meningkatnya kuantitas air, maka produksi pertanian juga dapat melesat. Jokowi pun memerintahkan agar komunikasi ke publik tentang proyek-proyek bendungan supaya "*rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan, apa manfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, sehingga*

muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki, kemudian ikut mengawasi, memantau, langsung pelaksanaan proyek yang ada [9:53]." Itu artinya, berdasarkan pemingkakan produsen teks, wacana yang dikonstruksi pemerintah, adalah bahwa proyek infrastruktur PSN, termasuk Bendungan Bener, bertujuan meningkatkan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun, wacana tersebut dilawan oleh produsen teks dengan berbagai data visual yang memperlihatkan bahwa janji-janji itu bersifat manipulatif.

Film ini menggambarkan sikap warga yang menolak pertambangan, terlihat dari modalitas deontik yang dapat ditemukan di sejumlah dialog. Modalitas deontik memperlihatkan bahwa pembicara melakukan perintah, larangan, atau izin kepada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Kata-kata penolakan atau larangan diucapkan oleh Khamim, Ngatinah, dan demonstran anti-pertambangan lewat kata-kata "jangan", "ojo "enggak boleh", dan "stop." Dalam cuplikan video yang memperlihatkan sebuah poster putih yang dibuat oleh

demonstran, terdapat teks larangan yang dengan eksplisit ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

[11:33] *Khamim: "Warga bukannya nolak bendungan, silakan mau bikin bendungan silakan, tapi jangan ngambil kuari (galian) di Wadas."*

[11:45] *Ngatinah: "Enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Enggak boleh diambil lah pokoknya. Enggak usah ngambil dari Desa Wasa pokoknya, kita enggak boleh"*

[13:58] *Tulisan poster "GANJAR OJO LAMIS (terj: jangan ingkari janji)! STOP TAMBANG BALONG & WADAS!"*

Terdapat empat alasan penolakan warga terhadap pertambangan yang diangkat di dalam film ini, yaitu ancaman hilangnya 27 titik mata air yang menjadi sumber air minum warga [20:52], potensi bencana longsor karena Desa Wadas merupakan daerah rawan bencana [21:39], dan kerusakan alam yang berdampak pada hilangnya ekosistem lebah madu [30:20] dan lahan pertanian warga

[31:24]. Seluruh alasan ini dapat dirangkum sebagai ancaman kerusakan ekologis berjangka panjang yang berpengaruh secara negatif kepada manusia dan hewan, serta memicu krisis pangan dan kekeringan. Selain itu, warga menolak untuk beralih profesi menjadi buruh pertambangan atau bekerja di tempat wisata bekas tambang yang dijanjikan pemerintah karena mereka merasa sudah hidup sejahtera sebagai petani. Narasi status quo kesejahteraan ini ditemukan dalam istilah "subur", "makmur", "sejahtera", "enak", "udah cukup" yang diucapkan narasumber. Film ini mengindikasikan bahwa menjadi buruh bukan opsi bagi masyarakat Wadas yang secara sosio-kultural hidup sebagai petani turun-temurun.

[32:48] Ngatinah: "Masa orang desa udah subur makmur gini malah kita buruh sama orang luar, gitu?"

[33:05] "Hidup kayak gini udah damai, damai, sejahtera, udah enak, aman... dari nenek moyang dulu enggak ada yang namanya orang kelaparan. Alhamdulillah cukup, dari hasil bumi itu udah cukup buat petani Wadas semua."

2. *Identitas*

Terdapat tiga identitas yang diangkat di dalam film ini, yaitu korban, pelaku, dan pengamat. Identitas pertama, yaitu korban, direpresentasikan oleh Ngatinah, Khamim, dan Bustomi sebagai warga Desa Wadas yang bekerja menjadi petani atau peternak. Penggambaran mereka sebagai korban dapat dilihat dari pemakaian istilah "orang kecil" yang dimanipulasi dan dibohongi oleh pemerintah, seperti teks berikut yang diucapkan oleh Ngatinah:

[7:24] Ngatinah: "Orang kecil kan enggak dikasih tahu ini mau ditambang, mau diambil apanya, enggak tahu. Cuma yang tahu itu lurahnya doang. Kalau lurahnya ditanyain katanya enggak apa-apa, ini enggak, apa ya, enggak meresahkan warga itu..."

Di samping itu, Ngatinah mengaku menjadi korban kekerasan oleh polisi saat berpartisipasi dalam salah satu aksi protes bersama masyarakat. Beberapa istilah kekerasan (predikat) muncul di film ini, seperti "ditarik", "diseret", dan "ditampar", di mana pelakunya (subjek) adalah aparat polisi bersenjata. Penggunaan kata kerja pasif berulang-ulang juga

memposisikan Ngatinah sebagai korban yang tidak berdaya.

[18:52] Ngatinah: "Katanya saya itu jadi orang provokator ya. Disitu saya ditarik. Itu ada yang nuding-nuding, katanya aparat polisi gitulah. Terus saya ditarik kebelakang, saya diseret..."

[19:17] disitu saya diangkat, digotong gitu. Saya nggak jalan, saya diangkat, di situ digotong sampai ke belakang, ... dekat mobil belakang paling belakang lah disitu saya didudukin situ, saya ditampar."

Terakhir, identitas korban diungkapkan lewat posisi ketiga warga ini yang terancam kehilangan pekerjaan sebagai petani jika pemerintah melakukan pertambahan. Ancaman tersebut dikonfirmasi oleh Pakar Hukum Lingkungan UGM, Agung Wardana, di mana ia mengungkapkan posisi para petani yang tidak berdaya di hadapan potensi kerusakan lingkungan dan potensi pemaksaan peralihan pekerjaan menjadi buruh yang tidak otonom.

[31:16] Agung Wardana: "Ketika kawasan sudah ditambang, artinya

dia akan kehilangan kesuburannya. Artinya secara ekologis sudah tidak bisa untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian... ini yang kemudian akan menimbulkan dampak bagi masyarakat lokal. Dan mereka akan menjadi kelas pekerja, kelas proletar yang harus menjual tenaga mereka"

Selain ketiga warga tersebut, identitas korban juga disematkan pada sejumlah komunitas lokal yang aktif menolak pertambahan lewat aksi-aksi protes dan upaya hukum. Komunitas yang disebutkan dalam film ini adalah Wadon Wadas (Perempuan Wadas), Gempa Dewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas), dan Kamu Dewa (Kawula Muda Desa Wadas). Berbeda dengan Ngatinah, Khamim, dan Bustomi, komunitas ini diperlihatkan sebagai korban yang memiliki kekuatan karena berhasil menggalang dan memobilisasi upaya perlawanan.

Meskipun begitu, penggambaran kekuatan komunitas warga tetap dibingkai sebagai bentuk ketidakberdayaan, ketika teks menarasikan bagaimana

komunitas mengajukan tuntutan ke PTUN Semarang agar Izin Penetapan Lokasi (IPL) dibatalkan, namun akhirnya ditolak. Warga tidak menyerah dan mengajukan kasasi, lalu film tidak menceritakan lagi kelanjutan proses hukum tersebut.

Identitas kedua, yaitu pelaku, disematkan pada pemerintah. Film ini berulang-ulang menyinggung beberapa nama penting yaitu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (disebut 3x), dan Presiden Joko Widodo (disebut 4x). Ganjar disebut mengeluarkan IPL pada 8 Juni 2018, dan izin inilah yang menjadi "dasar penambangan di Desa Wadas [16:55]." Sementara itu, penambangan di Wadas disebut sebagai dampak buruk dari program pembangunan negeri yang diciptakan oleh Presiden Jokowi, yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) [26:40]. Film ini membingkai program tersebut sebagai kebijakan yang buruk karena membutuhkan pembebasan lahan masyarakat secara paksa dan merusak lingkungan. Jokowi pun disebut mendorong penerbitan UU No.11 Tahun 2020 Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam rangka memberikan kelancaran bagi program tersebut. Di sini,

pemerintah diidentifikasi sebagai sumber dari segala upaya perusakan alam di Desa Wadas, sekaligus pihak yang berseberangan dengan warga. Hal ini terungkap dari cuplikan aksi demonstrasi warga Wadas yang memperlakukan Ganjar dan Jokowi sebagai oponent dan pelaku kejahatan lingkungan:

[14:07] Demontran: "Maka dari itu, warga Wadas, Purworejo, ... mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk menerima segala tuntutan warga. Yang kedua, mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo untuk menghentikan segala bentuk perampasan tanah di Desa Wada, Yang ketiga, mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk tidak memfasilitasi aktivitas tambang dan perusakan alam di Desa Wadas dengan dalih kepentingan umum"

Identitas ketiga, yaitu pengamat, merupakan pihak yang berada di luar area konflik, namun disertakan di dalam narasi film ini dalam rangka memperkuat wacana dan memverifikasi permasalahan yang berjalan di Wadas. Para pengamat ini direpresentasikan oleh Himawan Kurniadhi (anggota Walhi

Yogyakarta), Julian Duwi Prasetyo (Ketua Divisi Advokasi LBH Yogyakarta), dan Agung Wardana (Pakar Hukum Lingkungan UGM). Seluruh figur ini berada di pihak korban karena semua argumen dan data yang mereka utarakan bersifat memperkuat, mengonfirmasi, dan menjelaskan realitas yang diceritakan oleh korban. Himawan Kurniadhi memaparkan kecurigaannya pada izin pertambangan dan draft AMDAL yang hanya menganalisis dampak lingkungan proyek Bendungan Benur, bukan pertambangan Wadas. Julian Duwi Prasetyo menyebut kegagalan hukum di mana Wadas dijadikan sebagai wilayah pertambangan dengan mekanisme pengadaaan tanah untuk kepentingan umum, padahal pertambangan tidak termasuk ke dalam proyek kepentingan umum. Di luar argumen tersebut, Julian mengaku menjadi korban aparat kepolisian dalam peristiwa keributan yang melibatkan gas air mata, di mana ia dan seorang anggota LBH Yogyakarta ditangkap. Agung Wardana menegaskan ulang argumen Julian terkait proyek kepentingan umum, sekaligus menambahkan bahwa

rezim Jokowi menyerupai era Orde Baru karena menjadikan pembangunan ekonomi sebagai panglima dan hukum sebagai fasilitas pembangunan itu.

Terdapat sejumlah ideintitas yang disembunyikan dalam teks ini, yaitu warga yang mendukung pertambangan, pengamat yang melihat dampak baik dari proyek pembangunan Jokowi, serta penggambaran identitas pemerintah yang hanya disampaikan lewat footage resmi negara dan klaim pengamat, bukan lewat wawancara langsung. Namun, penyembunyian identitas seperti ini dapat dipahami karena produsen teks menjalankan praktik jurnalisme advokasi yang pada dasarnya memihak kelompok marjinal dan menyuntikkan opini dalam karyanya (Yusningtyas, et al. 2020), bukan menceritakan dua sisi realitas.

3. *Relasi*

Relasi antara produsen teks dan penonton bisa ditemukan dalam struktur cerita film ini, yang dimulai dengan penggambaran kehidupan sehari-hari tiga warga

Desa Wadas, deskripsi masalah, dan ditutup dengan artikulasi harapan warga. Penempatan kisah hidup warga di bagian awal membuat penonton berempati, merasa terhubung secara emosional, dan mengetahui status quo kehidupan warga sebelum adanya ancaman tertentu. Dalam fase deskripsi masalah, produser teks memasukkan banyak data dalam bentuk infografi, animasi, wawancara dengan pakar hukum dan lingkungan, serta berbagai footage resmi pemerintah dan video amatir terkait kejadian momentum seperti kericuhan. Data-data tersebut ditampilkan secara bergantian untuk mengonstruksi wacana produser teks, sekaligus meyakinkan penonton, tentang realitas di Wadas. Film ini diakhiri dengan warga yang mengartikulasikan harapannya agar tempat tinggalnya tetap lestari dan "waras". Kata-kata penutup yang memanfaatkan modalitas intensional ini mengajak penonton untuk merenungi nasib Desa Wadas di hadapan proyek pembangunan pemerintah. Modalitas intensional ini ditemukan dalam kata "harapan" yang bermakna permintaan, ajakan, dan keinginan.

[33:25] Bustomi: *"Iya, harapan saya Wadas tetap waras, tetap lestari, supaya kedepannya warga di sini juga kembali seperti dulu-- kembali bertani, bercocok tanam."*

Identitas-identitas yang ditampilkan dalam film juga mengungkapkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pemerintah dan warga Desa Wadas. Pemerintah, yang direpresentasikan oleh Jokowi dan Ganjar Pranowo, memegang otoritas dan kekuasaan besar karena berwenang mengeluarkan IPL yang menjadi dasar perizinan proyek tambang. Sebagai presiden, Jokowi memiliki otoritas untuk mengaktualisasi program PSN-nya dengan memanfaatkan aksesnya terhadap penerbitan hukum, yaitu UU No.11 Tahun 2020 Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan itu, ia dapat memperlancar proses pembebasan lahan masyarakat. Selain itu, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengirimkan pasukan polisi bersenjata lengkap dalam rangka menghalau penolakan warga Desa Wadas. Akses terhadap senjata, serta hak menangkap dan melakukan kekerasan kepada perempuan Wadas, tentu menjadikan polisi berada di posisi dominan di hadapan warga. Kontras dengan posisi pemerintah, warga Wadas berada dalam posisi subordinat

karena mereka tidak memiliki akses yang setara dalam perancangan undang-undang, tidak diberitahu tentang penerbitan izin tambang, mengalami kekerasan, serta terancam kehilangan pekerjaan yang sudah digeluti sejak nenek moyang. Pemaksaan, manipulasi, dan absennya akses merupakan wacana yang dikonstruksi produsen film tentang warga Wadas.

B. Praktik diskursif

Film "Wadas Waras" adalah film kedua dalam serial "DEMI 1%" yang merupakan serial kolaborasi antara Watchdoc, Greenpeace, Fraksi Rakyat Indonesia, dan gerakan Bersihkan Indonesia. Serial ini mengangkat berbagai problematika di tanah air pasca pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja atau Omnibus Law. Episode pertama dibuka dengan film berjudul "Karpas Merah Oligarki (2021)" yang mendokumentasikan berbagai akses negatif Omnibus Law (WatchdoC Documentary, 2021).

Sejak diunggah di Youtube pada tanggal 2 November 2021, film dokumenter "Wadas Waras" mampu meraup 455,863 views dan 2.506 komentar per 27 Mei 2022. Berdasarkan dua komentar yang mendapat likes terbanyak dari penonton lain, dapat dilihat sikap khalayak yang menyetujui narasi yang disampaikan oleh produsen teks, bahkan melakukan re-statement dan kampanye penyelamatan Desa Wadas.

Wayan Suardana (613 likes per 27 Mei 2022): "Satu kata yang sudah sangat ditinggalkan maknanya oleh orang2 jaman sekarang, "CUKUP".. orang2 desa adalah yg paling memahami apa itu cukup. Salam dari Bali. 🙏"

Renaldi Riawan (574 likes per 27 Mei 2022): "Bertahun tahun saya hidup aman dan nyaman di kota Purworejo, kota yang berirama, namun semenjak proyek yang beratasnamakan pemerintahan dengan alih alih kemakmuran, kenyamanan tersebut semakin meredup, setiap harinya aparaturnegara dengan pakaian dinasnyaberkunjung dengan dalih patroli, apa ini!!! "KAMI INGIN HIDUP SEPERTI SEDIKALA, INI TANAH KAMI,

INI SURGA KAMI, MENGAPA KALIAN INGIN MERUSAKNYA!! kami mohon dukungan dan doa dari kalian semua untuk perlawanan kami, demi kota kecil kami, terimakasih. #savewadas"

Watchdoc Media Mandiri atau Watchdoc merupakan production house independen yang memproduksi karya-karya film dokumenter bertema isu-isu sosial-politik dari hak asasi manusia hingga permasalahan lingkungan yang seringkali tidak diangkat di media tradisional. Perusahaan media alternatif ini didirikan pada tahun 2011 oleh dua jurnalis Indonesia, Dandhy Laksono dan Andhy Panca Kurniawan, yang sebelumnya bekerja di kantor media tradisional namun merasa tidak nyaman dengan limitasi kebebasan jurnalistik di sana. Pendirian Watchdoc didasarkan pada spirit membagikan cerita-cerita komunitas tertindas. Pada tahun 2021, Watchdoc menerima Ramon Magsaysay Award (RMA) atau penghargaan setara Nobel Prize di tingkat Asia atas kontribusi kepemimpinan mereka di Indonesia (Tantuco, 2021).

Sebelum "Wadas Waras (2021)", Watchdoc telah melahirkan banyak film dokumenter, di antaranya "Belakang Hotel (2014)"

yang mengangkat masalah penyusutan air tanah di Yogyakarta akibat pembangunan hotel; "Samin vs Semen (2015)" yang menceritakan perjuangan petani di Kendeng melawan pabrik semen yang memicu kerusakan lingkungan; "Rayuan Pulau Palsu (2016)" yang mendokumentasikan penolakan nelayan di Jakarta melawan reklamasi; "Jakarta Unfair (2016)" yang merekam para korban pengurusan di ibukota (Umama, 2021); dan "The Endgame (2021)" tentang pelemahan KPK.

Sutradara "Wadas Waras", Edy Purwanto, merupakan seorang akademisi sekaligus praktisi komunikasi di bidang penyiaran. Rekam jejaknya dimulai dari studi jurnalistik di Universitas Diponegoro Semarang, kemudian lanjut bekerja di stasiun televisi ANTV sebagai reporter sejak 1994. Karir Edy di dunia penyiaran tidak berhenti di sana, namun terus menanjak menjadi asisten produser, produser, hingga produser eksekutif. Isu jurnalistik yang pernah ia tangani beragam, mulai dari isu sosial, ekonomi, kriminal, hingga politik. Pada tahun 2010, Edy berhenti bekerja sebagai praktisi di bidang penyiaran dan memilih fokus menjadi akademisi dan pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia

(Yayasan Indonesia Care, 2021). Kemudian pada 2014, ia bergabung dengan Watchdoc (Tantuco, 2021).

Dalam sebuah wawancara, Edy mengatakan bahwa Watchdoc bukan perusahaan media yang memprioritaskan keuntungan finansial dengan menayangkan film mereka di bioskop. Alih-alih mereka melakukan public screening secara gratis agar masyarakat mau berdiskusi tentang isu yang diangkat di film hingga pada akhirnya terpicu melakukan aksi perubahan tertentu. Setelah itu barulah film tersebut diunggah ke media sosial seperti Youtube (Tantuco, 2021). Di sini dapat dilihat bahwa tujuan produksi Watchdoc berfokus pada penyebaran informasi yang jarang diangkat di media arus utama, membangun koneksi antarwarga sehingga muncul kesadaran kolektif dan gerakan riil di lapangan.

C. Praktik sosial

Film "Wadas Wadas" berupaya memotret paradigma developmentalisme yang memiliki sejarah kelam di Indonesia sejak

rezim Orde Baru. Pada masa awal konsolidasi rezim Soeharto, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat mengkhawatirkan. Dengan adanya inflasi mencapai 600% dan meningkatnya angka pengangguran, kondisi sosial dan politik sangatlah tidak stabil. Karena itu, Soeharto mencoba menukar prinsip Orde Lama yang memprioritaskan politik (Politik adalah Panglima) ke jargon "Ekonomi adalah Panglima". Ambisi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik pun menjadi tujuan utama Orde Baru yang diwujudkan lewat praktik otoriter dan militeristik. Pada titik ini, Orde Baru mengadopsi paradigma developmentalisme (Julizarsyah & Harya, 2012). Istilah 'negara pembangunan' sendiri berasal dari model pertumbuhan ekonomi di Asia Timur, misalnya yang terjadi pada Jepang dan Korea Selatan yang mengembangkan kebijakan ekonomi intervensionis dan sistem birokrasi efisien dalam rangka mendorong industrialisasi pesat pasca Perang Dunia Kedua (Warburton, 2016).

Pembangunan yang terjadi era Orde Baru didukung lewat pinjaman dari Bank Dunia. Dimulai pada 1968, Bank Dunia menggelontorkan pinjaman dana yang besar untuk pengembangan sektor pertanian Indonesia (World Bank, 2018). Namun, pinjaman ini dihantui oleh tuntutan liberalisasi ekonomi dan investasi asing langsung yang berdampak pada warga lokal. Jutaan hektar hutan yang awalnya dikelola turunturun, terpaksa diserahkan kepada perusahaan swasta. Rezim Orde Baru pun melakukan reformasi hukum yang menegaskan kewenangan pemerintah untuk memberikan akses sumber daya alam kepada segelintir pengusaha, contohnya yang tertera dalam Undang-Undang Kehutanan tahun 1967 (Sonkin, 2018).

Pasca Reformasi, paradigma yang serupa diteruskan oleh Jokowi namun dengan warna yang baru. Jokowi mengadopsi developmentalisme baru (new developmentalism) yang menekankan program pembangunan teknokratik. Ia meyakini bahwa tugas negara adalah menargetkan pembangunan pesat dalam rangka mengikuti jejak negara-negara maju. Negara diwajibkan untuk mengintervensi ranah ekonomi

agar mempercepat industrialisasi lewat kebijakan yang sempit dan pragmatis. Developmentalisme baru bersifat konservatif karena menghindari urusan-urusan politik yang sensitif, seperti korupsi, reformasi hukum, dan good governance. Hal-hal semacam itu dianggap tidak lebih penting daripada tujuan pembangunan pesat (Warburton, 2016)

Perbedaan mencolok antara pembangunan ala Jokowi dibanding pada masa Soeharto terletak pada kebijakan ekonomi-politik. Developmentalisme baru Jokowi lebih bersandar pada ideologi statis-nasionalis. Artinya, pemerintah melihat pembangunan negara harus ditopang oleh pemerintah yang kuat, stabil, dan berdaulat serta melepaskan ketergantungan pada pasar internasional dan kapital asing. Karena itulah, pemerintah Jokowi menggelontorkan dukungan yang besar pada BUMN lewat pemberian akses pada kapital dan kontrak-kontrak strategis, serta bantuan dana \$3 triliun pada 2015 (Warburton, 2016). Dalam kasus Wadas, pembangunan Bendungan Bener dan Pertambangan Wadas merupakan proyek milik Kementerian PUPR (Tempo, 2022). Kementerian PUPR melelang kontraktor proyek tersebut yang

dimenangi oleh tiga BUMN, yaitu PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi 2, PT Pembangunan Perumahan Tbk., dan PT Waskita Karya Tbk. (Kompas, 2022). Nilai investasi proyek tersebut mencapai Rp 2,06 triliun yang berasal dari dana APBN-APBD (Tempo, 2022).

Meskipun begitu, bukan berarti Jokowi meninggalkan model neoliberalisme dan pasar bebas. Ia tetap mempertahankan kebijakan liberal lewat paket deregulasi ekonomi yang dapat mempermudah investasi sektor privat karena rencana pembangunannya sebesar \$411 triliun pada akhirnya akan memerlukan campur tangan dari sektor tersebut. Hanya saja, Jokowi tidak melihat liberalisasi ekonomi sebagai prioritas, namun merupakan opsi terakhir jika terjadi batasan pendanaan yang serius. Paket deregulasi dianggap sebagai upaya memodernisasi rezim investasi Indonesia, bukan meliberalisasi (Warburton, 2016).

Contoh paket deregulasi Jokowi dapat ditemukan dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berkali-kali disebut dalam film

"Wadas Waras". Pada tahun 2020, Omnibus Law adalah RUU paling kontroversial. Banyak pihak menuding proses perancangan draft RUU yang cacat formil, tidak transparan, hingga adanya pasal bermasalah seperti pemberian kelonggaran investasi bagi perusahaan yang merusak lingkungan. Kontroversi tersebut memicu serangkaian aksi protes di berbagai kota yang dihadiri kelompok buruh, mahasiswa, hingga aktivis lingkungan. Amnesty International Indonesia mencatat lebih dari 400 peserta aksi ini mengalami kekerasan oleh polisi (Tempo, 2020). Dalam pidatonya menyusul aksi protes yang masif itu, Jokowi membela Omnibus Law dengan alasan undang-undang tersebut akan menyediakan lapangan kerja lebih besar bagi masyarakat serta memudahkan prosedur izin usaha yang akan bermanfaat bagi usaha mikro kecil (CNN, 2020).

Namun, dalam film "Wadas Waras", keberadaan Omnibus Law, tepatnya UU No.11 Tahun 2020 Cipta Kerja dibingkai sebagai alat untuk melancarkan agenda pembangunan Jokowi yang tidak

memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi warga. Janji-janji lapangan pekerjaan diberikan kepada warga Wadas yang sejatinya tidak membutuhkan pekerjaan baru karena mereka sudah berprofesi sebagai petani dan peternak. Film ini menampilkan penolakan para petani untuk beralih profesi menjadi buruh atau bawahan karena mereka menikmati sifat pekerjaan yang independen, tidak bergantung pada atasan, dan tanpa ikatan. Kesejahteraan yang mereka rasakan adalah alasan kuat untuk tidak mencari-cari lapangan kerja baru di luar sana.

Selain itu, pasal-pasal Omnibus Law yang memberikan kewenangan pemerintah untuk membebaskan dan mengalihfungsikan lahan pertanian demi PSN ternyata mengabaikan HAM dan keadilan bagi rakyat. Seperti diungkap dalam teks film, para petani dan aktivis yang menolak pertambangan Wadas menjadi target kekerasan oleh aparat kepolisian bahkan ditangkap secara sewenang-wenang. Meskipun Jokowi tidak mewarisi sifat represif ala Orde Baru, Warburton (2016) melihat paradigma developmentalisme gaya barunya mengindikasikan

pengabaian terhadap HAM karena hal-hal sensitif semacam itu dianggap tidak lebih penting daripada tujuan pembangunan pesat. Hal ini dibuktikan dari kasus-kasus pembiaran tindak diskriminasi kepada beberapa kelompok minoritas, pengabaian atas keadilan korban-korban kekerasan negara di masa lalu, dan penunjukkan tokoh pelanggar HAM seperti Wiranto sebagai salah satu menteri.

KESIMPULAN

Film "Wadas Wadas" menceritakan peristiwa pertambangan batu andesit oleh pemerintah di Desa Wadas. Hasil pertambangan hendak dijadikan material pembangunan Bendungan Bener yang diproyeksikan menjadi sumber irigasi ke wilayah sekitarnya, kecuali Desa Wadas sendiri. Film ini memperlihatkan penolakan masif dari warga karena pertambangan berpotensi memicu krisis pangan, kekeringan, dan kerusakan ekologis jangka panjang. Pertambangan Wadas dan Bendungan Bener dibingkai sebagai eksekusi negatif dari program ambisius Presiden Jokowi yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough, penelitian ini

menemukan bahwa dalam dimensi analisis teks, produser teks, yaitu Watchdoc, memotret tiga identitas dengan relasi kuasa yang tidak setara. Pihak korban yang disematkan pada warga lokal Wadas berada dalam posisi subordinat di hadapan pihak pelaku yaitu pemerintah pusat dan provinsi. Identitas pengamat yang berada di luar hubungan ini muncul dalam rangka memperkuat wacana dan mempertegas realitas pihak korban. Dalam dimensi praktik diskursif, keberpihakan produser teks pada warga lokal Wadas sesuai dengan spirit Watchdoc sendiri sebagai rumah produksi yang membagikan cerita-cerita komunitas tertindas dan membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat. Dalam dimensi praktik sosial, produser teks mengkonstruksi wacana anti-developmentalisme baru Jokowi yang bersandar pada ideologi statis-nasionalis yang berupaya melepaskan ketergantungan pada pasar internasional dan kapital asing. Seperti yang terjadi pada Wadas, Jokowi memberikan akses kapital partambangan pada BUMN. Di saat yang sama, dalam rangka melancarkan proyek

pembangunan, ia mendorong paket deregulasi Omnibus Law. Film ini membingkai keberadaan Omnibus Law sebagai undang-undang yang merugikan rakyat kecil karena memberikan janji-janji yang salah sasaran serta kewenangan bagi pemerintah untuk mengalihfungsikan lahan rakyat tanpa memedulikan aspek HAM. Dalam paradigma developmentalisme baru Jokowi, hal-hal sensitif seperti HAM semacam itu dianggap tidak lebih penting daripada agenda pembangunan yang pragmatis.

SARAN DAN REKOMENDASI

Limitasi penelitian ini terletak pada absennya wawancara dengan produser teks sehingga proses di balik produksi film tidak terungkap secara lengkap. Karena itu, penulis mengajukan saran bagi penelitian selanjutnya agar menggunakan metode wawancara dalam analisis wacana kritis Fairclough agar objek penelitian dapat digali secara lebih mendalam.

DAFTAR RUJUKAN**JURNAL:**

Julizarsyah, R. & Harya, M. (2012). "Novel "Peri Kecil Di Sungai Nipah": Potret Pembangunanisme Dan Marginalisasi Masyarakat Desa Pada Awal Konsolidasi Kekuasaan Rezim Orde Baru." *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, vol. 2, no. 2.

Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297-322.

Suryani, I., Kamiyatein., & Izar, J. (2021). Strategi Eksklusi pada Film Dokumenter The Mahuzes Karya Watchdoc Documentary: Kajian Critical Discourse Analysis Theo Van Leeuwen. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3).

Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297-320.

Yusningtyas, Y., Gelgel, N., & Suryawati, I. (2020). Analisis

Wacana Jurnalisme Advokasi dalam Film Dokumenter Sexy Killers. *E-Jurnal Medium*, 1(2).

BUKU

Eriyanto. 2001. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS.

Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press.

Haryatmoko (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers

Howarth, David (1998). *Discourse*. Buckingham: Open University Press

WEBSITE:

CNN (2020). Pernyataan Lengkap Jokowi Jawab Kritik Omnibus Law Ciptaker. CNN.com. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009203601-32-556717/pernyataan-lengkap-jokowi-jawab-kritik-omnibus-law-ciptaker>

Patriella, Y. (2018). 3 BUMN Menangi Lelang Bendungan Bener. Siapa Saja Mereka?. *Bisnis.com*. Retrieved from:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180625/45/809037/3-bumn-menangi-lelang-bendungan-bener.-siapa-saja-mereka>

Tempo (2022). Nilai Investasi dan Progres Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas. Retrieved from: <https://bisnis.tempo.co/read/1559264/nilai-investasi-dan-progres-pembangunan-bendungan-bener-di-desa-wadas/full&view=ok>

Tempo (2020). Kaleidoskop 2020: 10 Momen Politik Dari Harun Masiku Hingga Reshuffle Kabinet. Retrieved from: <https://nasional.tempo.co/read/1417291/kaleidoskop-2020-10-momen-politik-dari-harun-masiku-hingga-reshuffle-kabinet>

Tantuco, V. (2021). WatchDoc: Championing independent media in Indonesia. Rappler.com. Retrieved from: <https://www.rappler.com/world/asia-pacific/production-house-watchdoc-championing-independent-media-indonesia>

WorldBank (2018). Indonesia dan Bank Dunia: Kemitraan dari Waktu ke Waktu. Retrieved from World Bank Group: <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2018/10/02/indonesia-and-the-world-bank-partners-through-time>

Yayasan Indonesia Care (2021). Susunan Pengurus. Retrieved from: <https://indonesia-care.org/susunan-pengurus>

LAPORAN

Sonkin, F. (2018). INDONESIA: THE WORLD BANK'S FAILED EAST ASIAN MIRACLE. The Oakland Institute.

SKRIPSI

Utari, M. R. E. (2020) Analisis Wacana Kritis terhadap Film Dokumenter The Mahuzes pada Kanal Youtube Watchdoc Image. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman.

Umama, K. I. (2021). Implementasi Jurnalisme Advokasi dalam

Film Dokumenter Sexy Killers Produksi Watchdoc. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Fadli, A. (2017). Analisis Naratif Perlawanan Terhadap Reklamasi Di Kampung Nelayan Dalam Film Dokumenter Rayuan Pulau Palsu Karya Watch Doc. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

RUJUKAN LAIN

WatchdoC Documentary
[@watchdoc_ID]. (2021, December 24). *DEMI 1%, serial kolaborasi @GreenpeaceID @FraksiRakyat_ID @bersihkan_indo dan Watchdoc masih terus berlanjut. Serial ini menyajikan problematika Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja atau Omnibus Law* [Tweet].
Twitter.
https://twitter.com/watchdoc_ID/status/1474383213258625031